

	Pemerintah Kabupaten Brebes Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Jl. Veteran No. 11 Telp. (0283) 671667	Nomor SOP	BPPKAD/AKUNT/AKUNT/020
		Tanggal Pembuatan	Kamis, 06 September 2018
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Kepala BPPKAD Kab. Brebes
Bidang Akuntansi dan Pelaporan		Nama SOP	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 067 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 061 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	- Memiliki kewenangan melakukan penyusunan Lap Pertanggungjawaban APBD - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan instansi lain yang terkait
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- SOP Penyusunan LKPD	- Laporan Keuangan Pemda Audited - LHP BPK-RI - Keputusan bersama Bupati & DPRD atas Rancangan Raperda Pertanggungjawaban APBD - Hasil Evaluasi Gubernur atas Perda Pertanggungjawaban APBD - Komputer, Printer, ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- Perlu diperhatikan penjadwalan sesuai Permendagri 13/2006 - Perlu diperhatikan peraturan penyampaian informasi keuangan daerah kepada kementerian keuangan terkait sanksi penundaan/pembatalan penyaluran	- Disposisi Kabid kepada Kasubid Pelaporan - Berkas usulan Raperda Pertanggungjawaban APBD - Berkas usulan Raperbup Pertanggungjawaban APBD - Surat penyampaian Raperda Pertanggungjawaban dan permohonan untuk dibahas kepada DPRD - Surat penyampaian Raperda Pertanggungjawaban dan permohonan untuk dievaluasi kepada Gubernur